

## **Optimalisasi Rekrutmen Calon Panwascam Berdasarkan Basis Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pilkada 2024**

**Faizal Rusdi Bachtiar<sup>1</sup>, Hasan Ismail<sup>2</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>1</sup>

[faizalrxbow13@gmail.com](mailto:faizalrxbow13@gmail.com), [hasanismail@untag-sby.ac.id](mailto:hasanismail@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Optimalisasi rekrutmen calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) oleh Bawaslu Kota Surabaya menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental sebagai persyaratan utama. Kebijakan ini didorong oleh tingginya angka kematian petugas pemilu pada 2019 akibat masalah kesehatan, dengan 108 petugas meninggal dunia karena berbagai penyakit. Dalam Pemilu 2024, Bawaslu Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa calon Panwascam yang terpilih memiliki kesiapan fisik dan mental yang memadai. Pemeriksaan kesehatan dijadikan syarat administrasi utama, dengan dukungan teknologi berupa aplikasi pemantauan kesehatan. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan kesehatan ini, berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn. Evaluasi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini berhasil menyaring calon yang layak secara kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bawaslu dan Kementerian Kesehatan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemantauan terus-menerus di setiap tahap seleksi diperlukan untuk memastikan bahwa standar kesehatan diterapkan secara konsisten dan berdampak positif pada pelaksanaan Pilkada 2024.

**Kata Kunci:** Rekrutmen Panwascam, Kesehatan Fisik dan Mental, Evaluasi Kebijakan, Bawaslu Kota Surabaya, Pilkada 2024.

### **ABSTRACT**

*The optimization of the recruitment process for Subdistrict Election Supervisory Committee (Panwascam) by Bawaslu Kota Surabaya emphasizes the importance of physical and mental health as a primary requirement. This policy was driven by the high mortality rate of election officials during the 2019 elections, where 108 officers died due to various health conditions. For the 2024 elections, Bawaslu Surabaya, in collaboration with the Ministry of Health, ensures that selected Panwascam candidates possess adequate physical and mental readiness. Health examinations are a key administrative requirement, supported by technology in the form of a health monitoring application. Students involved in this community service activity evaluated this health policy based on William N. Dunn's policy evaluation theory. The evaluation revealed that the policy effectively screened candidates with suitable health conditions, thereby enhancing the quality of election supervision. The involvement of key stakeholders, such as Bawaslu and the Ministry of Health, is crucial to the success of this policy. Continuous monitoring throughout each stage of the selection process is necessary to ensure that health standards are consistently applied and have a positive impact on the execution of the 2024 local elections.*

*Keywords:* Panwascam Recruitment, Physical and Mental Health, Policy Evaluation, Bawaslu Kota Surabaya, 2024 Elections.

### **PENDAHULUAN**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sebuah instansi yang mempunyai tugas dalam mengawasi berjalannya pemilu untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pemilihan umum. Bawaslu Kota Surabaya, sebagai bagian dari lembaga pengawasan pemilu, memiliki tanggung jawab besar untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk menyelenggarakan pengawasan pemilihan. Perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen Panwascam Bawaslu Kota Surabaya membentuk staff yang diberi tugas dalam

melaksanakan perekrutan calon Panwascam Kota Surabaya. Saat ini Bawaslu Kota Surabaya sedang menerapkan salah satu program dalam perekrutan yang sangat penting dalam aspek perekrutan calon Panwascam, yaitu Kesehatan calon Panwascam tersebut. Pada tanggal 14 – 19 Februari Bawaslu RI menyampaikan ada sekitar 1.332 jajaran Panwascam mendapatkan perawatan intens terkait Kesehatan, sekitar 1.077 orang sedang melakukan rawat jalan. Hal ini membuat bawaslu melakukan proses rekrutmen calon Panwascam selain dengan mengutamakan potensi yang dimiliki Calon Panwascam, Bawaslu Kota Surabaya lebih memperhatikan keadaan Kesehatan fisik, dan mental bakal calon Panwascam.

Program ini didukung oleh Kemenkes RI dalam hal ini Menkes Dr Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya siap membantu Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Pihak Kemenkes juga akan menyiapkan tim untuk membuat aplikasi sebagai alat untuk memantau Kesehatan anggota panwascam. Persyaratan Kesehatan ini dijadikan sebagai administrasi awal untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Panwascam. Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang kebijakan persyaratan Kesehatan sebagai salah satu persyaratan penting pendaftar calon Panwascam, melalui program magang atau Praktek Kerja Lapangan.

Bawaslu Kota Surabaya menjadi salah satu inisiatif strategis dalam melakukan tahap perekrutan dengan memperhatikan implementasi program syarat Kesehatan sebagai peningkatan kualitas pengawasan pemilu tersebut. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pengecekan berkas dan persyaratan, mulai dari tahap pendaftaran hingga pembentukan laporan. Pengalaman ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa, tetapi juga memperkaya pemahaman mereka tentang pentingnya kualitas SDM dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.

Karakteristik kedua adalah interdependensi fakta dan nilai, di mana evaluasi bergantung pada kombinasi antara fakta dan nilai. Tidak hanya harus ada bukti bahwa suatu kebijakan atau program mencapai tingkat kinerja tertentu, tetapi juga harus ada bukti bahwa hasilnya bermanfaat bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, bukti harus menunjukkan bahwa hasil tersebut merupakan hasil langsung dari tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu. Akibatnya, pemantauan sangat penting untuk evaluasi kebijakan yang efektif. Dalam konteks tersebut penulis melakukan evaluasi pada kebijakan persyaratan Kesehatan sebagai salah satu persyaratan penting pendaftar calon Panwascam dalam meningkatkan kualitas SDM untuk pengawasan pemilu. Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan secara maksimal dan memantau akibat dari penerapan kebijakan tersebut.

Objek yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah Badan Pengawasan Pemilu Kota Surabaya. Penelitian mengarah pada evaluasi kebijakan yang meliputi Pernyataan Kondisi Kesehatan Sebagai Persyaratan utama Pendaftaran Calon Panwascam dan masyarakat yang dijadikan sasaran yaitu calon Pendaftar baru dan pendaftar Existing Pemilu 2024. Tahap awal yang akan dilakukan adalah melakukan kunjungan pada subbagian SDM, tahap selanjutnya adalah melihat efektifitas penerapan Kebijakan Pernyataan Kondisi Kesehatan Sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Panwascam. Proses evaluasi dilakukan melalui tahap fokus nilai, interdependensi fakta dan nilai, dan keterlibatan pemangku kepentingan. William Dunn (1998: 608-609). Metode evaluasi kebijakan ini yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam melihat bagaimana implementasi sebuah kebijakan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan dalam proses pencapaian tujuan dalam menyaring peserta pendaftar Panwascam dari Kematian yang tidak terduga akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Hasil Evaluasi tersebut kemudian dideskripsikan berdasarkan proposisi teoritis yang sesuai dengan teori yang digunakan. Metode yang akan digunakan penulis untuk menganalisis evaluasi Kebijakan adalah Teori Evaluasi Menurut (William N Dunn (1998) untuk menentukan pelaksanaan Kebijakan Pernyataan Kondisi Kesehatan Sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Panwascam.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kehidupan sosial melalui perspektif individu (informan) dalam konteks alamiah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menulis artikel tentang kebijakan tersebut. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019, hlm. 17) adalah penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme. Ini digunakan untuk melakukan penelitian di lingkungan ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, dan metode pengumpulan data dan analisis kualitatif lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi yaitu menggunakan berbagai Teknik pengumpulan data secara gabungan /simultan wawancara mendalam, dan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif berdasarkan fakta berdasarkan hipotesis dan teori. (Fatmariyanti & Fauzi, 2023)

Pengabdian ini menggunakan metode observasi lapangan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data yang berfokus pada proses rekrutmen calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai kriteria utama. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap panitia rekrutmen dan calon Panwascam untuk memahami proses seleksi, serta tantangan yang dihadapi terkait penerapan standar kesehatan. Observasi juga dilakukan terhadap proses rekrutmen, mulai dari pendaftaran hingga tahap penetapan, untuk memastikan bahwa standar kesehatan diterapkan secara konsisten dan adil. Penulis dalam pengabdian ini berfokus pada upaya optimalisasi proses rekrutmen Panwascam yang berbasis pada kesehatan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada 2024. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memastikan bahwa Panwascam yang direkrut memiliki kesiapan fisik dan mental yang optimal, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan mencegah potensi masalah yang dapat mempengaruhi integritas Pilkada. Berikut adalah alur pelaksanaan proses rekrutmen calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dikembangkan oleh penulis.

### Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan



Pendaftaran calon Panwascam memiliki prosedur yakni ada 6 (enam) yang harus dilalui untuk melakukan rekrutmen Panwascam :

- a) Sosialisasi  
Sosialisasi pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan untuk pilkada tahun 2024 menetapkan jadwal tahapan untuk penyebaran pengumuman pemilihan calon anggota panwaslu kecamatan. Pendaftaran terdiri dari dua tahapan: peserta yang sudah ada dan peserta yang baru didaftarkan. Peserta yang keluar adalah mereka yang merupakan anggota panwaslu kecamatan yang saat ini menjalankan tugas pengawasan pemilu tahun 2024, untuk pendaftar saat ini dibuka dari 23 april - 2 mei, dan untuk pendaftar baru dibuka dari 3 - 25 Mei 2024.
- b) Pengumuman Pendaftaran  
Berdasarkan nomor 172/KP.01.00/JL-38/05/2024, Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pengumuman tentang pendaftaran calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan untuk pemilihan tahun 2024. Pengumuman pendaftaran untuk kategori pendaftar lama dan baru sudah di umumkan melalui website dan Instagram Bawaslu Kota Surabaya melalui media online.



Gambar 1 pengumuman perpanjangan rekrutmen

c) Penerimaan Berkas Pendaftaran

Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Untuk kategori baru, berkas pendaftaran calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan diterima dari tanggal 5 -7 Mei 2024. Untuk kategori lama, berkas pendaftaran dikirim ke kantor resmi Bawaslu Kota Surabaya di Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No. Kec. Rungkut.

Kategori	Perempuan	Laki-laki	Total
1	2	3	4
Pendaftar Existing	7	72	79

Tabel 1 : Jumlah Pedaftar Panwascam Existing setelah penutupan pendaftaran

Kategori	Perempuan	Laki-laki	Total
1	2	3	4
Pendaftar Baru	13	44	57

Tabel 2 : jumlah pendaftar kategori pendaftar baru

d) Pemeriksaan Berkas Administrasi

Pemeriksaan berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Hasil pemeriksaan berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan pada pemilihan tahun 2024 untuk kota Surabaya nomor 180/KP.01.00/JL 3. Hasil penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya sesuai jadwal tahapan. Masa perpanjangan untuk kategori yang ada ditutup hanya untuk kategori baru dari tanggal 9 - 11 Mei 2024.

e) Tes Tertulis

Untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada), Bawaslu Kota Surabaya menyelenggarakan tes tertulis (CAT) bagi calon anggota pengawas kecamatan di seluruh Kota Surabaya. Mereka yang dinyatakan lolos akan mengikuti tes tertulis di CBT Center UNUSA Tower Lantai 7 di Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jl. Raya Jemursari 51-57, Surabaya. Peserta ujian tertulis ini adalah pendaftar kategori baru yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh pokja pembentukan panwascam Bawaslu Kota Surabaya untuk 22 kecamatan di Kota Surabaya. Tes tertulis CAT ini dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama melibatkan empat ruangan, dan sesi kedua melibatkan tiga ruangan. Dari 180 peserta yang dinyatakan lolos administrasi, 165 hadir, dan 15 orang tidak hadir.

f) Tes Wawancara

Bawaslu Kota Surabaya akan menyelenggarakan Tes Wawancara pada tanggal 18–20 Mei 2024 dari jam 08.00 hingga selesai di Sheraton Surabaya Hotel & Tower, Jl. Embong Malang No. 25–31. Peserta harus hadir untuk

wawancara pada waktu yang telah ditentukan; peserta harus hadir 30 menit sebelum wawancara. Saat registrasi, peserta juga harus membawa kartu check list kelengkapan administrasi dan KTP elektronik asli. Dalam tes wawancara, Bawaslu Kota Surabaya akan menilai beberapa pertanyaan seperti berikut: a. Pendalaman visi dan misi calon anggota panwaslu kecamatan, motivasi, integritas, dan waktu, b. Pengalaman dan pengetahuan tentang pengawasan dan tata kelola pemilu inklusif, c. Kearifan lokal, d. Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas, dan kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.

Kategori	Perempuan	Laki-laki	Total
1	2	3	4
Panwascam Terpilih	14	79	93

Tabel 3 : Panwascam se-Kota Surabaya Terpilih

Dari Penyajian data diatas bisa dilihat bahwa pendaftar dari existing lebih mendominasi dalam perekrutan panwascam karena sebelumnya peserta Panwascam Existing ini suda pernah melakukan kegiatan pengawasan pada pemilihan calon presiden 2024. Setelah melakukan beberapa proses administrasi bisa dilihat pada table 3 jumlah pendaftar dari dua kategori sebanyak 136 peserta akan tetapi banyak yang gugur dan akhirnya hanya 93 peserta saja yang terpilih. Dalam hal ini banyak peserta gugur dalam syarat utama untuk menjadi Panitia Pengawas pemilu Kecamatan yakni kondisi Kesehatan, mengingat kejadian pada pemilihan presiden lalu dan pemilu pada tahun 2019 sebelumnya banyak pengawas yang meninggal dunia akibat kegiatan pengawasan. Hal ini membuat Bawaslu mengeluarkan kebijakan perekrutan yakni tentang kondisi Kesehatan sebagai persyaratan administrasi pendaftaran Calon Panwascam.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) saat melakukan perekrutan tidak hanya dilihat dari keahlian, skill, dan tetapi juga kondisi kesehatan. Hal ini menjadi poin yang sangat penting ketika melakukan sebuah pekerjaan. Melalui system rekrutmen Bawaslu Kota Surabaya menekankan persyaratan yakni tentang kondisi Kesehatan sebagai dokumen pendaftaran yang paling utama, dokumen tersebut sebagai syarat utama administrasi pendaftaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan pengawasan pemilu pihak yang memiliki tugas utama pengawasan dan penanganan pelanggaran ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan pemilu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu, selaiin Bawaslu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, peran masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pemilu adalah salah satu hal penting agar azas pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang bunyinya sebagai berikut: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." bunyi Pasal 2 UU Pemilu.

Peran masyarakat dalam mengawasi pemilu melalui pembentukan Panitia Pengawas Pemilu oleh Bawaslu Pendaftaran calon Panwascam dibuka oleh Bawaslu Kota Surabaya dari 23 April - 2 Mei 2024 untuk peserta yang sudah ada. Peserta yang sudah ada adalah mereka yang berasal dari anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini atau sedang menjalankan tugas pengawasan pemilu tahun 2024. Sedangkan pendaftaran peserta baru dimulai pada 3 Mei - 25 Mei 2024. Peserta baru adalah mereka yang tidak termasuk atau bukan berasal dari anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini atau sedang menjalankan tugas pengawasan pemilu 2024.

Pengalaman pemilu sebelumnya, terutama pemilu 2019 memicu kebijakan penekanan persyaratan Kondisi Kesehatan untuk persyaratan administrasi pendaftaran Calon Panwascam. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak petugas pemilu mengalami masalah kesehatan serius hingga meninggal dunia akibat beban kerja yang berat. Dilansir dari Tempo.co mencatat bahwa pada Pemilu 2024, 108 petugas pemilu meninggal dunia, dengan penyebab utama seperti penyakit jantung (30 kasus), kecelakaan (9 kasus), dan hipertensi (9 kasus). Statistik ini menegaskan perlunya penekanan pada kesehatan dalam proses perekrutan untuk meminimalisir risiko kesehatan yang mungkin dihadapi petugas selama masa pengawasan.

Tabel 4. Jumlah Angka Kematian Anggota Panwascam 2019 se Indonesia

No	Penyebab Kematian	Jumlah
1.	Penyakit jantung	30
2.	Kecelakaan	9
3.	Hipertensi	9
4.	Syok Septik	8
5.	Gangguan Pernapasan Akut	6
6.	Penyakit Serebrovaskur	6
7.	Diabetes melitus	4
8.	Kematian Jantung Mendadak	2
9.	Kegagalan Multiorgan	2

Sumber/Source : Tempo.co

Untuk itu, Bawaslu Kota Surabaya bersama Kementerian Kesehatan Surabaya telah menetapkan persyaratan kesehatan sebagai salah satu syarat utama dalam pendaftaran calon Panwascam. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan fisik dan mental, serta pihak Kemenkes berupaya menyediakan sebuah Aplikasi guna pemantauan kesehatan yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan calon Panwascam secara berkala. Langkah ini bertujuan supaya memastikan bahwa calon yang terpilih tidak hanya memenuhi kriteria administrasi, tetapi juga siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tugas pengawasan yang berat.

Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang penuh tekanan dan menuntut fokus yang tinggi. Bawaslu Kota Surabaya belum secara spesifik memasukkan program dukungan psikologis atau pelatihan mental sebagai bagian dari kebijakan rekrutmen Panwascam. Padahal, dalam menghadapi dinamika pemilu, seperti tuntutan waktu yang panjang, beban kerja yang berat, dan potensi konflik di lapangan, kesiapan mental sangatlah krusial untuk menjaga stabilitas emosi dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena itu, direkomendasikan agar ada upaya untuk memasukkan pemeriksaan psikologis dan pelatihan mental sebagai bagian dari seleksi Panwascam, serta memberikan dukungan psikologis berkala selama proses pengawasan berlangsung. Langkah ini akan memastikan bahwa tidak hanya fisik, tetapi juga mental para pengawas pemilu siap menghadapi segala tantangan yang ada. Keberhasilan kebijakan kesehatan dalam rekrutmen Panwascam oleh Bawaslu Kota Surabaya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan setempat dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi calon Panwascam, serta berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa standar kesehatan yang ditetapkan terpenuhi secara optimal. Selain itu, keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam menyediakan aplikasi pemantauan kesehatan menunjukkan adanya sinergi antara teknologi dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kesehatan Panwascam secara berkelanjutan. Kerja sama ini menjadi kunci utama dalam memastikan proses seleksi berjalan lancar dan meminimalisir risiko kesehatan selama masa pengawasan pemilu. Lebih lanjut, kerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan lainnya dapat diperkuat, misalnya dengan menyediakan pelatihan kesehatan mental atau layanan konseling untuk para pengawas, yang akan semakin menambah kesiapan mereka dalam menjalankan tugas.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini membantu siswa memahami bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat dan membentuk diri mahasiswa agar siap untuk menghadapi dunia kerja. Kegiatan Magang ini ditujukan untuk mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Selama kegiatan magang ini mahasiswa melakukan pendampingan dan pemeriksaan terkait dokumen pendaftaran calon Panwascam yang telah melakukan registrasi. Selain hal itu penulis juga melakukan reuiw bahkan melakukan revisi terhadap data penerimaan calon Panwascam sesuai dengan Surat Keterangan (SK) yang telah disesuaikan dari hasil perekrutan. Pemeriksaan dokumen hasil pendaftaran Panwascam sangat lah

penting karena selalu berubah setiap SK yang dikeluarkan dari hasil seleksi, seperti pembahasan diatas sebelumnya bahwa Bawaslu Kota Surabaya melakukan rekrutmen dengan mengutamakan kesehatan Calon Panwascam yang mendaftar. Dalam kegiatan Magang ini penulis berkesempatan untuk meng evaluasi bagaimana penerapan kebijakan perekrutan Panwascam ini dan apakah sudah sesuai dengan output sebuah kebijakan yang diinginkan.

## KESIMPULAN

Kebijakan rekrutmen Panwascam yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan menekankan kesehatan fisik dan mental sebagai persyaratan utama telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Proses seleksi yang memperhatikan kondisi fisik calon Panwascam berhasil mengurangi risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi efektivitas tugas pengawasan, terutama mengingat jumlah kematian petugas pemilu akibat masalah kesehatan yang tinggi pada Pemilu 2019. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang ketat, Panwascam yang terpilih lebih siap secara fisik untuk menjalankan tugas mereka dalam Pilkada 2024. Namun, kesehatan mental juga memegang peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang sarat tekanan. Sejauh ini, belum ada program dukungan psikologis yang terintegrasi secara formal dalam kebijakan rekrutmen. Padahal, beban kerja yang berat serta kondisi lapangan yang penuh tantangan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental para pengawas. Oleh karena itu, penting untuk memperluas kebijakan dengan mencakup pemeriksaan mental dan dukungan psikologis bagi calon dan Panwascam yang terpilih. Dukungan ini akan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan ketahanan mental yang kuat dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan setempat, dan pemangku kepentingan lain, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan aplikasi pemantauan kesehatan menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, potensi untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut dalam bentuk pelatihan kesehatan mental atau layanan konseling sangat penting untuk dipertimbangkan agar para pengawas pemilu tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga mental. Bawaslu Kota Surabaya perlu mempertimbangkan untuk memasukkan dukungan psikologis dan pelatihan kesehatan mental sebagai bagian dari proses rekrutmen Panwascam. Mengingat beratnya tanggung jawab pengawas pemilu, langkah ini akan sangat membantu dalam memastikan kesiapan menyeluruh para Panwascam, baik dari segi fisik maupun mental. Penyediaan layanan konseling yang dapat diakses secara berkala selama masa pengawasan juga penting untuk menjaga kesejahteraan mental mereka.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan kesehatan yang telah diterapkan untuk memastikan standar kesehatan tetap diterapkan secara konsisten. Pelibatan stakeholder lain, seperti Dinas Kesehatan dan lembaga kesehatan mental, dapat diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program pemantauan kesehatan Panwascam, serta memperluas cakupan dukungan kesehatan mental dalam proses pengawasan pemilu. Diharapkan bahwa dengan dukungan komprehensif ini, kualitas pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan, serta potensi risiko kesehatan yang bisa mempengaruhi integritas pelaksanaan pemilu dapat diminimalisir. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan ini juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemilu berlangsung. Terakhir, Bawaslu dapat mempertimbangkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya kesehatan fisik dan mental dalam tugas pengawasan pemilu. Langkah ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan memastikan bahwa proses rekrutmen dengan lebih baik untuk menjamin Pilkada yang aman, jujur, dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrizal, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 130–147. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.236>
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.

- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Reformasi*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>